

PERAN TEOLOGI PUBLIK MENGOKOHKAN KEDAULATAN INDONESIA MAJU

Yohanes Emanuel Tange

Sekolah Tinggi Fisafat Teologi Widya Sasana, Malang

Email: emanuelyohanes586@gmail.com

Abstrak: Tulisan ini mengkaji peran teologi publik dalam mengokohkan kedaulatan Indonesia maju di tengah dinamika global yang ditandai oleh interaksi antara nilai-nilai Barat dan Timur. Fokus diarahkan pada bagaimana teologi publik mampu berfungsi sebagai ruang refleksi kritis sekaligus praksis sosial-politik yang mengokohkan identitas dan martabat bangsa. Tujuannya untuk menyingkap relevansi teologi publik dalam merumuskan visi Indonesia maju yang tidak hanya bersifat ekonomis dan teknokratis, tetapi juga berakar pada nilai spiritual, etis, dan kebudayaan bangsa. Penulisan ini menggunakan metodologi studi kepustakaan. Data-data dikumpulkan melalui inventarisasi sumber-sumber tertulis yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, maupun dokumen. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu menafsirkan dan mengolah secara mendalam, membangun kerangka teoretis, serta melakukan analisis konseptual dan kritis terhadap berbagai pandangan yang ditemukan di literatur. Temuan penulisan ini menunjukkan bahwa teologi publik memiliki tiga kontribusi utama: pertama, sebagai kritik terhadap dominasi ideologi global yang berpotensi melemahkan kedaulatan; kedua, sebagai penguat nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan keberagaman dalam bingkai kebangsaan; dan ketiga, sebagai jembatan dialog Barat-Timur yang memperkaya perspektif Indonesia tanpa kehilangan identitasnya. Dengan demikian, teologi publik berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap globalisasi dan peneguhan kedaulatan nasional, sehingga visi Indonesia maju dapat terwujud secara lebih holistik dan berkeadaban.

Kata Kunci: *Kedaulatan, Sosial-Politik, Teologi Publik, Holistik*

Abstract: This paper examines the role of public theology in strengthening Indonesia's sovereignty amid global dynamics marked by the interaction between Western and Eastern values. The focus is on how public theology can function as a space for critical reflection and socio-political praxis that strengthens national identity and dignity. The aim is to reveal the relevance of public theology in formulating a vision of Indonesia that is not only economic and technocratic, but also rooted in the spiritual, ethical and cultural values of the nation. This paper uses a literature review methodology. Data was collected through an inventory of relevant written sources such as books, scientific journals, research reports, and documents. The collected data was then analysed using a descriptive qualitative approach, which involved interpreting and processing it in depth, constructing a theoretical framework, and conducting a conceptual and critical analysis of the various views found in the literature. The findings of this paper show that public theology has three main contributions: first, as a critique of the dominance of global ideologies that have the potential to weaken sovereignty; second, as a reinforcer of the values of justice, solidarity, and diversity within the framework of nationality; and third, as a bridge for East-West dialogue that enriches Indonesia's perspective without losing its identity. Thus, public theology plays an important role in maintaining a balance between openness to globalisation and the affirmation of national sovereignty, so that Indonesia's vision of progress can be realised in a more holistic and civilised manner.

Key words: *Sovereignty, Socio-Political, Public Theology, Holistic*

PENDAHULUAN

Dalam dinamika global yang kian kompleks, bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga kedaulatan dan identitasnya. Globalisasi membawa arus nilai-nilai baru, baik dari Barat maupun Timur, yang memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap politik, ekonomi, dan budaya. Dalam konteks ini, teologi publik menjadi penting sebagai ruang refleksi kritis sekaligus praksis sosial-politik yang mampu memperkuat fondasi kebangsaan (J.B. Banawiratma, 2010). Gagasan Banawiratma mengenai pentingnya teologi publik merupakan bentuk refleksi kritis atas peran agama dalam kehidupan sosial dan politik bangsa. Ia menegaskan bahwa teologi publik tidak boleh berhenti pada level wacana teologis atau dogmatis, tetapi harus hadir sebagai praksis yang nyata dalam upaya menegakkan keadilan dan kemanusiaan.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, teologi publik berfungsi sebagai ruang dialog antara iman dan kehidupan sehari-hari, di mana nilai-nilai moral dan spiritual berkontribusi terhadap penguatan identitas serta solidaritas kebangsaan. Banawiratma melihat teologi publik sebagai wadah etis yang menuntun masyarakat untuk berpihak pada mereka yang tertindas dan menjadi suara moral bagi korban ketidakadilan sosial. Dengan demikian, teologi publik berperan sebagai penggerak transformasi sosial yang membuka ruang kerja sama lintas agama dan budaya demi terciptanya kehidupan bersama yang lebih manusiawi. Pendekatan ini menjadikan teologi publik bukan semata-mata refleksi keagamaan, melainkan sumber daya moral yang memperkuat karakter bangsa Indonesia di tengah arus globalisasi dan tantangan kemajemukan. Namun, arogansi manusia untuk tetap mempertahankan cara ini dapat menunjukkan aspek “cara pikir praktis” dalam tindakannya (Riyanto, 2021).

Teologi publik bukan sekadar diskursus akademis, melainkan sebuah praksis iman yang hadir di ruang publik untuk menyuarakan keadilan, solidaritas, dan martabat manusia (Paul Tillich, 1957). Di Indonesia, keberadaan teologi publik menemukan relevansinya dalam upaya membangun visi Indonesia Maju, yang tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi dan modernisasi teknokratis, tetapi juga mengakar pada nilai spiritual, etis, dan kebudayaan bangsa (Max L. Stackhouse, 1987). Tulisan ini bertujuan menelaah bagaimana teologi publik dapat meneguhkan kedaulatan Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji wacana teologi publik dalam kaitannya dengan konsep kedaulatan, kebangsaan, dan visi Indonesia maju.

Dalam diskursus globalisasi, Giddens (2000) menyebut bahwa dunia telah berubah menjadi “tanpa batas”, di mana otoritas negara-bangsa terus mengalami penurunan akibat interdependensi global dan arus ideologi asing masuk tanpa filter. Dalam situasi seperti ini, teologi publik tampil sebagai kekuatan reflektif dan kritis yang mempersoalkan kecenderungan modernitas dan logika pasar yang mendominasi arena publik serta melemahkan kepekaan sosial dan spiritual masyarakat. Dengan berpijak pada nilai-nilai luhur Pancasila dan tradisi keagamaan, teologi publik harus mampu membangun paradigma pembangunan yang lebih adil, berkelanjutan, serta berorientasi pada kesejahteraan bersama, bukan hanya untuk segelintir kaum elit.

Kesadaran ini memperlihatkan bahwa teologi publik di Indonesia mesti mengadopsi pendekatan profetis dan kontekstual, menjadikan kebangsaan dan solidaritas sosial sebagai pilar utama dalam menghadapi tantangan multidimensi globalisasi. Di sinilah teologi publik mengambil peran sebagai kekuatan transformatif yang tidak sekadar “menyembuhkan luka” pembangunan yang timpang, tetapi juga memberikan arah moral serta visi etis dalam membangun Indonesia Maju. Dengan landasan filosofis, kebudayaan, serta etika kemanusiaan, teologi publik dituntut untuk senantiasa membangun cara pandang kritis terhadap realitas

kebangsaan, menghidupkan semangat gotong royong, dan memperkuat solidaritas di antara elemen-elemen bangsa dan agama.

Tujuan penelitian, sebagaimana diuraikan dalam file di atas, adalah mengkaji bagaimana teologi publik dapat meneguhkan kedaulatan Indonesia maju di tengah tarikan-tarikan globalisasi yang mengandung ambivalensi peluang dan ancaman. Kajian ini secara metodologis dilakukan melalui pendekatan studi pustaka dengan menganalisis gagasan-gagasan teologis yang berkembang baik di tingkat wacana internasional maupun dalam konteks praksis kebangsaan Indonesia. Penerapan metode kualitatif bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam atas peran diskursus teologi publik dalam memperkuat bangunan identitas bangsa Indonesia, mempertahankan nilai-nilai spiritual di ruang publik, sekaligus mendorong pembangunan yang berbasis pada keadilan sosial dan martabat seluruh rakyat.

Dengan demikian, urgensi pendahuluan ini adalah menggambarkan secara holistik masalah-masalah mendasar yang tengah dihadapi bangsa Indonesia: krisis identitas dalam globalisasi, ancaman reduksi nilai-nilai luhur akibat pragmatisme ekonomi dan politik, serta perlunya peran aktif teologi publik dalam membangun kerangka pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan bermartabat. Penegasan atas relevansi teologi publik di ruang publik Indonesia diharapkan tidak hanya menambah kekayaan diskursus ilmiah, tetapi juga mendorong perubahan praksis sosial-politik demi mewujudkan visi Indonesia maju yang holistik, beradab, dan berakar kuat pada nilai-nilai spiritual serta kebudayaan bangsa sendiri.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kajian kepustakaan, yaitu pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik yang dikaji. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menghimpun, membaca, dan menganalisis berbagai sumber tertulis-seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, maupun dokumen resmi-guna memperoleh dasar teoritis yang kuat untuk mendukung analisis penelitian. Tujuan dari kajian ini ialah menyusun kerangka teoretis yang komprehensif melalui telaah terhadap penelitian dan gagasan ilmiah terdahulu, sehingga dapat memperhatikan kesesuaian antara teori dan fokus kajian yang sedang ditelaah. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menafsirkan dan mengolah data pustaka secara deskriptif berdasarkan logika ilmiah. Berdasarkan metode ini, penulis mengkaji data-data dengan melakukan melalui inventarisasi sumber-sumber tertulis yang relevan, kemudian membaca serta mengelola informasi utama dari masing-masing sumber tersebut. Pengembangan instrumen dalam penelitian kepustakaan diwujudkan dalam bentuk skema analisis tematik dan kategorisasi, sehingga peneliti dapat menilai kesesuaian serta relevansi setiap data yang diperoleh dengan tujuan penelitian. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu menafsirkan dan mengolah bahan pustaka secara mendalam, membangun kerangka teoretis, serta melakukan analisis konseptual dan kritis terhadap berbagai pandangan yang ditemukan di literatur.

Karena penelitian ini murni berbasis studi kepustakaan, tidak digunakan alat dan bahan eksperimental; dengan demikian, tidak ada spesifikasi alat dan bahan laboratorium yang perlu dijelaskan. Setiap langkah dalam penelitian diarahkan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai teologi publik dan kontribusinya bagi kedaulatan Indonesia, dengan tetap mengutamakan integrasi konsep, argumentasi ilmiah, serta relevansi kontekstual sesuai data pustaka yang telah dihimpun dan dianalisis secara sistematis.

PEMBAHASAN

Teologi Publik: Konsep dan Relevansinya

Teologi publik dapat dipahami sebagai refleksi teologis yang memasuki ranah kehidupan publik-politik, ekonomi, hukum, budaya dan berupaya memberikan orientasi moral serta etis bagi kehidupan bersama. David Tracy menyebut teologi publik sebagai “dialog antara tradisi iman dan konteks budaya plural” yang memungkinkan gereja berbicara kepada dunia luas (Riyanto, 2021). Duncan Forrester menambahkan bahwa teologi publik harus mampu menjembatani iman dan kehidupan sosial-politik, sehingga keberadaannya menantang sistem yang tidak adil sekaligus memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Pandangan ini lebih dapat kita pahami karena orang melihat filsafat sebagai produk pemikiran bukan sebagai metodologi berfikir (Ikbal et al., 2024). Dengan demikian, teologi publik tidak identik dengan politik praktis, melainkan refleksi iman yang memberi arah moral bagi kebijakan publik.

Penelitian ini adalah studi kepustakaan yang mengkaji gagasan para teolog publik dan pemikir kebangsaan. Beberapa tokoh yang relevan, antara lain: David dengan konsep pluralisme teologis menekankan pentingnya dialog antartradisi agama (David Hollenbach, 2002). Ia melihat pluralisme bukan ancaman, melainkan peluang memperkaya pemahaman iman. Melalui keterbukaan dan refleksi kritis, pluralisme teologis dapat membangun harmoni, menghargai perbedaan, serta memperkuat komitmen terhadap keadilan dan solidaritas kemanusiaan. Dalam menekankan pentingnya teologi publik sebagai praksis etis yang membumi dapat menuntun tindakan sosial-politik demi keadilan, solidaritas, dan kesejahteraan bersama, sehingga iman nyata dalam kehidupan publik.

David Hollenbach dengan gagasan keadilan sosial dalam ruang publik (David Hollenbach, 2002), sebagai dasar membangun masyarakat inklusif, di mana setiap orang mendapat hak, martabat, dan kesempatan yang setara demi kesejahteraan bersama. Sugirtharajah mengenai pentingnya teologi kontekstual (R.S. Sugirtharajah, 2002). sebagai upaya mengaitkan iman dengan realitas lokal, sehingga teologi lebih relevan, membebaskan, dan mampu menjawab tantangan sosial budaya masyarakat setempat. Pemikiran Soekarno mengenai kedaulatan bangsa (Soekarno, 1961), menekankan pentingnya berdiri di atas kaki sendiri (berdikari), bebas dari dominasi asing, serta mengutamakan persatuan nasional demi mewujudkan keadilan sosial, kemerdekaan sejati, dan martabat Indonesia di dunia. Hasil kajian menunjukkan bahwa teologi publik tidak hanya berbicara dalam konteks religius, tetapi juga menyentuh isu-isu nasional seperti kebangsaan, kedaulatan, dan pembangunan berkeadilan.

Teologi Publik dalam Konteks Indonesia

Di Indonesia, teologi publik berinteraksi dengan pluralitas agama, budaya, dan sejarah bangsa. Pancasila sebagai dasar negara menyediakan ruang etis yang memungkinkan teologi publik untuk turut berkontribusi dalam membangun kehidupan bersama yang berkeadaban (Syamsul A'dlom, 2021). Menurut Banawiratma, teologi publik di Indonesia muncul sebagai respons terhadap kebutuhan menghadirkan suara moral dan profetis di tengah kompleksitas kehidupan beragama, sosial, dan politik bangsa. Teologi publik tidak hanya berbicara dalam ruang keagamaan sempit, melainkan hadir sebagai gerakan etis yang menegakkan keadilan, kemanusiaan, serta keberpihakan terhadap kelompok yang terpinggirkan. Melalui karya seperti *Teologi Publik dan Ketidakadilan*, Banawiratma menegaskan bahwa teologi mesti berpijak pada pembebasan holistik-untuk dan bersama para korban sebagai perwujudan nyata iman di ruang publik (Mbeo, 2023). Dengan demikian, teologi publik berfungsi sebagai jembatan antara

keyakinan religius dan tanggung jawab sosial dalam membangun kehidupan berbangsa yang adil dan bermartabat. Dalam konteks pluralisme agama dan politik Indonesia, pendekatan ini juga memperkaya demokrasi melalui nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial yang melampaui sekat-sekat identitas. Teologi publik, sebagaimana dirumuskan Banawiratma, bukanlah wacana eksklusif umat Kristiani semata, tetapi kontribusi religius yang memperkuat moral publik sebagai fondasi kedaulatan bangsa di tengah arus globalisasi. Dengan pendekatan yang kontekstual, reflektif, dan profetis, teologi publik menjadi praksis kemanusiaan yang menolak ketidakadilan, meneguhkan nilai solidaritas lintas iman, serta menjaga ruang publik tetap berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Berdasarkan uraian di atas mau menegaskan bahwa teologi publik di Indonesia berperan sebagai jembatan antara keyakinan religius dan tanggung jawab sosial dalam membangun masyarakat yang adil dan bermartabat. Di tengah dinamika pluralisme agama dan politik, teologi publik memperkaya demokrasi melalui nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas yang melampaui identitas sektarian. Pendekatan ini menegaskan bahwa teologi publik bukanlah wacana eksklusif satu agama, khususnya Kristen, melainkan ruang kontribusi religius yang menguatkan moral publik sebagai fondasi kedaulatan bangsa. Dengan cara yang kontekstual, reflektif, dan profetis, teologi publik menolak ketidakadilan, meneguhkan solidaritas antariman, dan menjaga ruang publik tetap berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Kedaulatan dalam konteks Indonesia tidak hanya bermakna kemandirian politik, tetapi juga mencakup dimensi kebudayaan, ekonomi, dan spiritualitas bangsa. Soekarno menegaskan pentingnya kedaulatan yang berakar pada kepribadian nasional, bukan sekadar meniru model asing, sebagaimana tercermin dalam konsep Trisakti: berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan (Fahrudin & Alfauq, 2023; Habibullah et al., 2022). Trisakti menolak segala bentuk imperialisme baru dan menegaskan pentingnya pembangunan yang berpihak pada rakyat serta menjaga integritas budaya bangsa (Habibullah et al., 2022; Yufriadi et al., 2023).

Teologi publik berperan sebagai penjaga nilai moral dan etis dalam mewujudkan kedaulatan tersebut. Ia mengkritisi dominasi ideologi global yang dapat mengancam keberlanjutan bangsa, serta memperkuat nilai keadilan, solidaritas, dan keberagaman (Hooton, 2025; Nanthambwe, 2025; Adiprasetya et al., 2013). Dalam menghadapi tantangan globalisasi yang membawa pengaruh positif dan negatif, teologi publik membuka ruang dialog kritis untuk menjaga identitas bangsa dan menolak hegemoni yang merusak, sekaligus menawarkan paradigma pembangunan yang berkeadilan dan manusiawi (Hooton, 2025; Nanthambwe, 2025; Adiprasetya et al., 2013; Pearson, 2019).

Dalam membangun visi Indonesia Maju, teologi publik memberikan fondasi moral dan spiritual agar pembangunan tidak hanya bersifat ekonomis dan teknokratis, tetapi juga berakar pada nilai kemanusiaan dan kebudayaan (Hooton, 2025; Nanthambwe, 2025; Alamu & Taiwo, 2024; Suhendi et al., 2025). Teologi publik menekankan pentingnya pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan bersama, keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan penghormatan terhadap keberagaman (Nanthambwe, 2025; Rahman et al., 2025; Dalimunthe et al., 2025). Penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman etis menjadi kunci dalam memperkokoh persatuan nasional dan menjaga kedaulatan bangsa di tengah arus globalisasi (Yufriadi et al., 2023; Burlian, 2020; Habibullah et al., 2022).

Sebagai praktik iman yang nyata, teologi publik menjadi kekuatan reflektif dan kritis yang menegaskan solidaritas sosial dan martabat manusia dalam pembangunan berkelanjutan Indonesia yang berkeadaban (Nanthambwe, 2025; Adiprasetya et al., 2013; Suhendi et al.,

2025). Dengan demikian, kedaulatan Indonesia harus dipahami sebagai integrasi antara politik, ekonomi, budaya, dan spiritualitas, yang diperkuat oleh teologi publik dan nilai-nilai Pancasila

Kedaulatan dalam Perspektif Indonesia

Kedaulatan dalam konteks Indonesia tidak hanya berarti kekuasaan politik yang mandiri, tetapi juga mencakup kemandirian ekonomi, kebudayaan, dan spiritualitas. Soekarno menekankan bahwa kedaulatan bangsa harus berakar pada kepribadian nasional, bukan sekadar meniru model Barat (Soekarno, 1961). Kedaulatan Indonesia mencakup aspek politik (kebebasan menentukan nasib sendiri), ekonomi (kemandirian dalam pembangunan), dan budaya (pemeliharaan identitas bangsa). Dalam hal ini, teologi publik dapat berperan sebagai penjaga nilai-nilai moral dan etis yang mendasari visi kedaulatan tersebut. Setiap penerapan teori tentu akan berimplikasi pada hal-hal yang diinginkan atau kadang-kadang tidak diinginkan (Sergius Lay, at. al, 2025).

Tantangan Globalisasi

Globalisasi menghadirkan peluang sekaligus ancaman. Di satu sisi, ia membuka akses terhadap pengetahuan, teknologi, dan kerja sama internasional. Namun di sisi lain, globalisasi dapat melemahkan identitas bangsa melalui dominasi budaya, ekonomi, dan ideologi asing (Haryatmoko, 2010). Globalisasi memang membawa dampak ganda yang perlu disikapi dengan bijak. Akses terhadap ilmu, teknologi, dan kerja sama internasional memberi peluang bagi kemajuan bangsa, terutama dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, ancaman terhadap identitas bangsa tidak dapat diabaikan, sebab dominasi budaya, ekonomi, dan ideologi asing berpotensi mengikis nilai-nilai lokal serta melemahkan kedaulatan nasional.

Oleh karena itu, diperlukan strategi selektif dalam menerima pengaruh global, yakni dengan memanfaatkan peluang positif sekaligus memperkuat jati diri bangsa melalui pendidikan, kebudayaan, serta pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi bersama. Dalam buku Anthony Giddens menyebut globalisasi sebagai “dunia tanpa batas” yang mengikis otoritas negara-bangsa (Anthony Giddens, 2000). Karena itu, peran teologi publik diperlukan untuk memberikan kritik terhadap ideologi global yang hegemonik dan merumuskan paradigma pembangunan yang berakar pada nilai-nilai bangsa. Dalam pandangannya, globalisasi merupakan proses yang kompleks dan dinamis, yang tidak hanya memperkuat interdependensi antarbangsa, tetapi juga menggeser struktur kekuasaan dan melemahkan otoritas negara-bangsa. Situasi ini menuntut kehadiran teologi publik sebagai kekuatan reflektif dan kritis terhadap ideologi global yang hegemonik. Peran teologi publik menjadi penting untuk menyoroti dimensi etis dari modernitas yang sering kali didominasi oleh logika pasar bebas dan kepentingan korporasi transnasional. Dengan berpijak pada nilai-nilai luhur bangsa, teologi publik dapat menawarkan paradigma pembangunan yang lebih manusiawi dan berkeadilan, yang menempatkan solidaritas sosial dan tanggung jawab moral di atas kepentingan ekonomi semata. Dalam konteks Indonesia, teologi publik menjadi wadah moral untuk merumuskan kritik konstruktif terhadap globalisasi yang eksploitatif sekaligus memperkuat kedaulatan nilai-nilai kebangsaan di tengah arus dunia yang semakin terbuka.

Peran Teologi Publik Dalam Mengokohkan Kedaulatan Indonesia Maju Kritik terhadap Dominasi Ideologi Global

Teologi publik berfungsi sebagai suara kritis terhadap dominasi ideologi global yang seringkali meminggirkan nilai-nilai lokal. Kapitalisme global misalnya, dapat menciptakan

ketidakadilan struktural yang mengancam kedaulatan ekonomi bangsa. Teologi publik memiliki peran penting sebagai kekuatan moral dan kritis dalam menghadapi dominasi ideologi global yang cenderung mengabaikan nilai-nilai lokal. Dengan pendekatan reflektif dan etis, teologi publik dapat menyingkap ketidakadilan struktural yang muncul dari sistem kapitalisme global, seperti kesenjangan sosial, eksploitasi sumber daya, dan melemahnya kedaulatan ekonomi bangsa. Lebih dari itu, teologi publik mendorong kesadaran kolektif untuk meneguhkan solidaritas, keadilan, serta keberpihakan pada kelompok lemah.

Secara lebih praktis, teologi publik tidak hanya berhenti pada diskursus akademis semata, melainkan menjadi instrumen nyata dalam memperjuangkan kedaulatan dan pembangunan yang berkeadilan. Sebagaimana ditegaskan oleh David Hollenbach, peran teologi publik harus meluas menjadi pembela keadilan sosial, khususnya bagi mereka yang termarginalkan oleh ideologi neoliberal yang lebih mengutamakan keuntungan segelintir pihak daripada kebaikan bersama. Oleh karena itu, kritik teologi publik terhadap neoliberalisme ini sekaligus berimplikasi pada perjuangan kemandirian ekonomi bangsa yang menolak ketergantungan buta pada mekanisme pasar bebas dan aliansi global yang eksploitatif. Maka, teologi publik berfungsi sebagai kritik terhadap ideologi global, dan juga memegang peranan strategis dalam penguatan nilai keadilan, solidaritas, serta keberagaman yang berlandaskan pada nilai-nilai kebangsaan. Di Indonesia yang majemuk secara agama dan budaya, teologi publik menjadi jembatan etis yang menguatkan persatuan bangsa lewat spirit Pancasila, yang menegaskan persatuan dalam keberagaman serta keberpihakan pada keadilan sosial. Dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi etik, teologi publik mampu menghadirkan kehidupan sosial yang inklusif, beradab, dan adil, yang sekaligus menjadi benteng moral menghadapi penetrasi ideologi asing yang berpotensi meruntuhkan harmoni nasional. Di tingkat yang lebih luas, teologi publik juga berperan sebagai jembatan dialog antara nilai-nilai peradaban Barat dan Timur, memperkaya perspektif bangsa tanpa menghilangkan identitas nasionalnya. Melalui pendekatan reflektif dan selektif terhadap pengaruh global, teologi publik mampu menyerap nilai universal seperti hak asasi manusia dan demokrasi sekaligus mempertahankan kearifan lokal seperti gotong royong dan musyawarah. Dengan demikian, peran teologi publik di Indonesia bukan saja sebagai ruang wacana religius, tetapi sebagai praksis sosial yang menegaskan kedaulatan dan keberlanjutan peradaban Indonesia dalam menghadapi tantangan kompleks globalisasi. Pendekatan ini memungkinkan bangsa Indonesia tampil sebagai subjek yang berdaulat dan berdaya di kancah dunia, menjaga martabat serta kedaulatan nasional secara integral dan berkeadaban.

Dengan demikian, ia bukan hanya menjadi wacana akademik, melainkan instrumen praksis untuk memperjuangkan kedaulatan dan keberlanjutan pembangunan yang berkeadilan. David Hollenbach menegaskan bahwa teologi publik harus berperan dalam memperjuangkan keadilan sosial, khususnya bagi kelompok yang terpinggirkan (David Hollenbach, 2002). Dengan demikian, teologi publik di Indonesia dapat mengkritisi praktik neoliberalisme yang hanya menguntungkan segelintir pihak, sambil memperjuangkan kemandirian ekonomi bangsa.

Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan

Teologi publik juga berperan dalam memperkuat nilai keadilan, solidaritas, dan keberagaman. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, solidaritas lintas agama dan budaya menjadi kunci menjaga persatuan bangsa. Banawiratma menekankan bahwa teologi publik harus berlandaskan semangat Pancasila, sehingga dapat meneguhkan persatuan nasional (J.B. Banawiratma, 2010). Dengan cara ini, teologi publik berkontribusi dalam menciptakan kehidupan sosial yang berkeadaban, adil, dan inklusif. Dengan menjadikan Pancasila sebagai

fondasi, teologi publik mampu memperkuat persatuan nasional sekaligus menghadirkan nilai keadilan, keberadaban, dan inklusivitas dalam kehidupan sosial, sehingga kedaulatan bangsa tetap terjaga di tengah arus globalisasi. Pancasila, sebagai hasil refleksi kebudayaan bangsa, mengandung nilai-nilai universal yang mampu menjembatani iman dan kemanusiaan lintas agama serta budaya. Dalam kerangka teologi publik, Pancasila berfungsi sebagai ruang etik bersama tempat setiap tradisi keagamaan dapat berkontribusi bagi kebaikan bersama tanpa kehilangan identitas spiritualnya.

Nilai-nilai keadilan, keberadaban, dan inklusivitas yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar bagi terciptanya kehidupan sosial yang harmonis, menghargai perbedaan, dan menjunjung martabat manusia. Dengan demikian, teologi publik berbasis Pancasila tidak hanya berperan dalam memperkuat persatuan nasional, tetapi juga menjadi kekuatan moral dalam menjaga kedaulatan bangsa terhadap penetrasi ideologi asing yang bersifat hegemonik. Melalui sintesis nilai-nilai ilahiah dan kebangsaan, teologi publik menjadikan Pancasila sebagai pedoman praksis dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, beradab, dan berkepribadian Indonesia.

Jembatan Dialog Barat-Timur

Indonesia berada pada persimpangan peradaban Barat dan Timur. Teologi publik dapat berfungsi sebagai jembatan dialog yang memperkaya perspektif tanpa kehilangan identitas nasional. Di satu sisi, keterbukaan terhadap nilai Barat membawa kemajuan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan tata kelola. Di sisi lain, warisan nilai Timur, termasuk kearifan lokal dan spiritualitas, menjadi sumber kekuatan identitas nasional. Teologi publik dapat berperan sebagai jembatan dialog yang mempertemukan kedua arus besar ini, bukan untuk mencairkan perbedaan, melainkan memperkaya perspektif bersama.

Dengan landasan Pancasila, teologi publik mampu menafsirkan realitas global secara kritis dan selektif, sehingga nilai-nilai universal dapat diadopsi tanpa mengikis jati diri bangsa. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia memelihara persatuan dalam keragaman, sekaligus mengambil peran aktif dalam percaturan global. Teologi publik, dalam hal ini, bukan hanya wacana religius, melainkan juga praksis sosial yang meneguhkan kedaulatan dan keberlanjutan peradaban Indonesia maju. Sugirtharajah, menggarisbawahi pentingnya teologi kontekstual yang membuka diri terhadap wacana global, tetapi tetap berakar pada budaya lokal (R.S. Sugirtharajah, 2002). Dalam konteks ini, teologi publik Indonesia dapat mengintegrasikan nilai-nilai universal (hak asasi manusia, demokrasi) dengan tradisi lokal (gotong royong, musyawarah). Teologi kontekstual perlu memiliki keterbukaan terhadap wacana global dan tetap berakar kuat pada budaya lokal. Artinya, dalam menghadapi tantangan dan pengaruh globalisasi, teologi tidak boleh kehilangan identitas dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dari tradisi serta kultur masyarakat setempat. Prinsip ini penting agar teologi tetap relevan dan membumi, bukan sekedar mengadopsi ide atau konsep asing tanpa pertimbangan konteks lokal. Dalam konteks teologi publik di Indonesia, pendekatan ini memungkinkan integrasi antara nilai-nilai universal, seperti hak asasi manusia dan demokrasi, dengan tradisi lokal yang khas, seperti gotong royong dan musyawarah. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya makna teologis tapi juga memperkuat harmoni sosial dan solidaritas dalam masyarakat pluralistik Indonesia, sehingga teologi menjadi jembatan penghubung antara globalisasi dengan kearifan lokal yang lestari. Dengan demikian, teologi kontekstual ini mampu menjembatani dan mensinergikan dinamika universal dan lokal secara seimbang.

Teologi Publik dan Visi Indonesia Maju

Visi Indonesia Maju yang dicanangkan pemerintah menekankan pada pembangunan ekonomi, teknologi, dan infrastruktur. Namun visi ini berpotensi bersifat teknokratis apabila tidak disertai dengan dimensi moral dan spiritual. Namun, apabila visi tersebut hanya dipahami secara teknokratis, ada risiko pembangunan kehilangan arah moral dan mengabaikan aspek kemanusiaan. Di sinilah teologi publik dapat memberi sumbangan penting. Pertama, teologi publik menghadirkan fondasi etis yang menempatkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama sebagai tujuan pembangunan, bukan hanya pertumbuhan material. Kedua, ia mengingatkan bahwa teknologi dan infrastruktur harus berpihak pada keberlanjutan lingkungan serta kepentingan rakyat kecil, bukan sekadar keuntungan jangka pendek. Ketiga, teologi publik menghidupkan kembali semangat solidaritas, persaudaraan, dan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh proses pembangunan. Dengan demikian, visi Indonesia Maju tidak hanya menjadi proyek material, melainkan juga gerakan moral-spiritual yang meneguhkan martabat manusia dan menjaga kedaulatan bangsa di tengah dinamika global.

Teologi publik dapat memberikan fondasi etis bagi visi Indonesia Maju melalui tiga hal: Mengokohkan orientasi pembangunan pada kesejahteraan bersama, bukan hanya pertumbuhan ekonomi (Gustavo Gutiérrez, 1973). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi memang penting, tetapi jika tidak disertai pemerataan, maka hanya akan memperlebar kesenjangan sosial dan memperkuat dominasi kelompok tertentu. Pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan bersama menuntut adanya kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan, pemberdayaan masyarakat, serta jaminan akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Selain itu, kesejahteraan bersama juga mencakup keberlanjutan lingkungan agar generasi mendatang dapat menikmati hasil pembangunan. Di sinilah nilai-nilai etika, spiritualitas, dan Pancasila menjadi penuntun, sehingga pembangunan tidak terjebak pada paradigma materialistik. Dengan orientasi ini, pembangunan Indonesia dapat menjadi lebih inklusif, berkeadilan, dan mampu meneguhkan persatuan bangsa, sekaligus menjaga martabat dan kedaulatan nasional di tengah tantangan global.

Menjaga agar pembangunan tetap memperhatikan keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Pembangunan yang berkelanjutan harus selalu berorientasi pada keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Tanpa memperhatikan keadilan, pembangunan hanya akan melahirkan kesenjangan dan meminggirkan kelompok rentan. Demikian pula, tanpa menjaga lingkungan, pembangunan akan merusak ekosistem dan mengorbankan generasi mendatang. Oleh karena itu, setiap kebijakan pembangunan perlu memastikan distribusi manfaat yang adil, akses setara terhadap sumber daya, serta keberpihakan pada masyarakat kecil. Selain itu, prinsip ramah lingkungan harus menjadi prioritas melalui inovasi hijau, pengelolaan sumber daya berkelanjutan, dan kesadaran ekologis. Dengan demikian, pembangunan benar-benar menjadi sarana mewujudkan kesejahteraan bersama.

Memastikan bahwa modernisasi tidak mengikis identitas dan spiritualitas bangsa (Sebastian Kim, 2011). Modernisasi harus dijalankan secara selektif agar tidak mengikis identitas dan spiritualitas bangsa. Nilai budaya dan kearifan lokal perlu dijadikan dasar dalam menyerap perkembangan baru. Dengan demikian, modernisasi justru memperkuat karakter nasional sekaligus menjaga akar spiritual masyarakat di tengah arus perubahan global. Dengan demikian, Indonesia Maju tidak hanya diukur dari aspek material, tetapi juga dari kematangan moral dan budaya masyarakatnya.

KESIMPULAN

Teologi publik memiliki peran penting dalam meneguhkan kedaulatan Indonesia Maju di tengah tantangan global. Pertama, ia berfungsi sebagai kritik terhadap dominasi ideologi global

yang dapat melemahkan kedaulatan bangsa. Kedua, teologi publik memperkuat nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan keberagaman dalam bingkai kebangsaan. Ketiga, teologi publik menjadi jembatan dialog Barat-Timur yang memperkaya perspektif Indonesia tanpa kehilangan identitasnya. Globalisasi kerap membawa pengaruh positif berupa kemajuan teknologi, keterbukaan informasi, serta peluang kerja sama internasional. Namun, di balik itu terdapat ancaman berupa penetrasi ideologi asing, kapitalisme yang eksploitatif, maupun homogenisasi budaya yang dapat melemahkan jati diri bangsa. Dalam konteks inilah, teologi publik hadir sebagai kekuatan kritis. Ia tidak sekadar berfungsi sebagai wacana akademis, tetapi juga sebagai suara profetis yang mengingatkan masyarakat agar tetap selektif dan berdaulat dalam menyerap nilai-nilai global. Selain bersifat kritis, teologi publik juga memperkuat sendi-sendi kebangsaan melalui penekanan pada nilai keadilan, solidaritas, dan keberagaman. Indonesia sebagai negara multikultural memerlukan fondasi moral yang mampu merawat persatuan dalam keragaman. Teologi publik memberikan sumbangan dalam membangun kesadaran kolektif bahwa pembangunan tidak boleh hanya menguntungkan sebagian pihak, melainkan harus berorientasi pada kesejahteraan bersama. Dengan meneguhkan solidaritas sosial, teologi publik turut menjaga integrasi nasional sekaligus memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan publik.

Lebih jauh lagi, teologi publik juga berperan sebagai jembatan dialog antara peradaban Barat dan Timur. Indonesia berada di persimpangan kedua peradaban besar ini, sehingga terbuka peluang untuk memperkaya wawasan melalui dialog yang konstruktif. Teologi publik memfasilitasi pertemuan nilai-nilai universal dengan kearifan lokal tanpa mengorbankan identitas nasional. Melalui pendekatan ini, Indonesia tidak sekadar menjadi objek globalisasi, tetapi mampu tampil sebagai subjek yang berdaulat, berdaya, dan bermartabat. Dengan demikian, teologi publik tidak hanya relevan secara teologis, tetapi juga strategis bagi keberlanjutan Indonesia Maju di tengah tantangan global. Dengan demikian, visi Indonesia Maju yang berkeadaban hanya dapat terwujud jika pembangunan tidak semata-mata bersifat ekonomis dan teknokratis, melainkan berakar pada nilai spiritual, etis, dan kebudayaan bangsa. Teologi publik, dalam hal ini, memberikan fondasi moral dan refleksi kritis yang sangat dibutuhkan bangsa dalam menjaga kedaulatannya di era globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiprasetya, J., Keunikan, T., & Mereka, K. (2013). In Search of a Christian Public Theology In The Indonesian Context Today. <https://doi.org/10.36383/diskursus.v12i1.121>
- Alamu, S., & Taiwo, B. (2024). The Roles of Christian Theologians in the Church, Academia, and Society in the Context of Matthew 5:13-16. *Pharos Journal of Theology*. <https://doi.org/10.46222/pharosjot.106.33>
- Banawiratma, J. B. (2010). *Teologi Publik di Indonesia: Refleksi dan Praksis*. Kanisius.
- Burlian, P. (2020). Pemikiran Soekarno dalam Perumusan Pancasila, 5, 143–169.
- Dalimunthe, A., Erwani, I., & Syam, A. (2025). A Model of Religious Harmonization in Indonesia: The Syncretic Dialectic of Tridharma and Islam (Analysis Of Wasathiyah Verses and the Theology of Confucianism, Buddhism, And Taoism).

Pharos Journal of Theology. <https://doi.org/10.46222/pharosjot.106.409>

Giddens, A. (2000). *Runaway World: How Globalisation is Reshaping Our Lives*. Routledge.

Gutiérrez, G. (1973). *A Theology of Liberation*. Orbis Books.

Habibullah, L., Haryono, B., & Demartoto, A. (2022). Ideology Movements of Trisakti Trilogy: Remending Maritime Archipelagic as a Concept of Indonesian Unity in the Threat of Democracy and Sovereignty Crisis. *Journal of Maritime Studies and National Integration*. <https://doi.org/10.14710/jmsni.v5i2.10555>

Haryatmoko. (2010). *Etika Politik dan Kekuasaan*. Gramedia.

Hollenbach, D. (2002). *The Common Good and Christian Ethics*. Cambridge University Press.

Hooton, P. (2025). Public Theology and Global Catastrophic Risk. *International Journal of Public Theology*. <https://doi.org/10.1163/15697320-20251616>

Ikbal, M., Sukardi, I., & Astuti, M. (2024). The Tradition of Western Philosophy of Education: Ancient Philosophy, the Middle Ages, and Modern Education. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 3(5), 1791–1805. <https://doi.org/10.61445/tofedu.v3i5.295>

Kim, S. (2011). *Christianity as a World Religion*. Continuum.

Lay, S., Zebua, P., Sipahutar, A. P., Naibaho, M., & Y., B. S. (2025). Implementasi Teori Belajar Sibernetik Menurut Landa Dalam Pendidikan Agama Katolik. *Vocat: Jurnal Pendidikan Katolik*, 5(1), 1–14.

Mbeo, E. K. (2023). Keadilan Sebagai Hasil Kerja Kolektif Pemerintah-Masyarakat Dalam Memberantas Korupsi dan Ketidakadilan Hukum di Indonesia. *Studia Philosophica et Theologica*, 23(1), 40–54. <https://doi.org/10.35312/spet.v23i1.495>

Nanthambwe, P. (2025). Addressing systemic racism in South Africa: A missio-public theological perspective. *Verbum et Ecclesia*. <https://doi.org/10.4102/ve.v46i1.3385>

Pearson, C. (2019). Editorial: The Sitz im Leben of a Public Theology. *International Journal of Public Theology*. <https://doi.org/10.1163/15697320-12341558>

Riyanto, A. (2021). *Teologi Publik Sayap Metodologi & Praksis*. Kanisius.

R., Widyawati, F., Hafis, M., Lon, Y., Alwi, Z., I., & Ilyas, A. (2025). Pathways to Tolerance: A Comparative Analysis of Hadith and Gospel in the Indonesian Context. *Pharos Journal of Theology*. <https://doi.org/10.46222/pharosjot.106.2015>

Soekarno. (1961). *Di Bawah Bendera Revolusi*. Panitia Penerbitan.

Stackhouse, M. L. (1987). *Public Theology and Political Economy*. Eerdmans.

Suhendi, S., Khoiruddin, H., Ihsan, M., Nasir, T., & Sain, Z. (2025). Hasyim Asy'ari's Dimensions of Multicultural Spiritual Leadership: Harmony in Education and Society in Indonesia. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*.
<https://doi.org/10.35723/ajie.v9i1.50>

Sugirtharajah, R. S. (2002). *Postcolonial Criticism and Biblical Interpretation*. Oxford University Press.

Syamsul A'dlom, Y. B. (2021). Etika Guru Menurut Perspektif Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 265–280. <https://doi.org/10.37286/ojs.v7i2.108>

Tillich, P. (1957). *Theology of Culture*. Oxford University Press.

Yufriadi, F., Fitri, D., & Afifi, A. (2023). Pengaruh Nasionalisme Soekarno Terhadap Ketatanegaraan dan Politik Islam di Indonesia. *Perwakilan: Journal of Good Governance, Diplomacy, Customary Institutionalization and Social Networks*.
<https://doi.org/10.58764/j.prwkl.2023.1.39>